

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ampera. (2023), *Statistik Sektor Kota Padang Panjang*. Padang Panjang: Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Padang Panjang.
- Atikah Ika. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. (1 ed). Surabaya: CV Haura Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Hadjon, Philipus M., dkk. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- HR, Ridwan. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Munaf, Yusri. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Pertama. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV Social Politic Genius.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarti. (2019). *Buku Ajar Perumahan dan Permukiman*. Cet 1. Semarang: Undip Press.
- Sunggono, Bambang. (2007). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2015). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. (Cet 3). Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. (2002) *Penelitian hukum dalam praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiwik Sri Widiarty. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 18)

Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Nomor 050/09A/PERKIMLH-PP/I/2020 tentang Indikator Kinerja (IKI) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang.

Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 189 Tahun 2020 tentang Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Di Kota Padang Panjang.

### C. Jurnal

Alimuddin, Ruhendri, Muhamad Lutfi, Nurul Chayati, dan Ilham Bintang. "Kajian Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: RW 06 Kelurahan Jatipulo, Jakarta Barat)." *Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* 5, no. 4 (2021): 326. <https://doi.org/10.12962/j26151847.v5i4.21565>.

Araujo, Carla Magno, Winny Astuti, dan Galing Yudana. "Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kawasan Semanggi, Kota Surakarta." *Desa-Kota* 5, no. 2 (2023): 155. <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i2.73074.155-169>.

Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Penjelasan Hukum (Restatement) Konsep Tindakan Administrasi Pemerintahan Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 1 (2022): 64. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.64-92>.

- Darmawan Subekti, Titin Rohayatin, dan Tinda Irawaty. "Strategi Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Mengatasi Wilayah Kumuh Di Kota Cimahi." *Praxis Idealis* 2, no. 1 (2025): 15. <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.3360>.
- Firna Novi Anggoro. "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 4 (2016): 24.
- Lahya, Raudatul Jannah, Mappamiring Mappamiring, dan Ahmad Harakan. "Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Makassar." *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)* 5, no. 2 (2024): 249–58. <https://doi.org/10.26618/kimap.v5i2.14153>.
- Lingga Abi Rahman, Jeora Nitysa Aprily, Muhammad Faishal Fadhlurrahman, Nurul Nurul Rani Komalasari, dan Muhammad Luthfi Setiarno Putera. "Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik* 1, no. 4 (2024): 306–12. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i4.401>.
- Pratiwi, Nana Novita, Mira Sophia Lubis, Ely Nurhidayati, Agustiah Wulandari, dan Vita Elysia. "Identifikasi strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh berdasarkan indikator pencetusnya (Studi kasus: Desa Sosok, Tayan)." *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* 19, no. 2 (2024): 495. <https://doi.org/10.20961/region.v19i2.77162>.
- Salim, Emil, dan Agustina Setiawan. "Efektivitas Dinas Perumahan Dan Permukiman Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2022 Di Kota Bogor." *Jurnal Prinsip: Jurnal Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.36859/prinsip.v1i1.2921>.
- Waha, Caecilia. "PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PERKOTAAN." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 1, no. 2 (2014).

#### D. Internet dan Sumber Lainnya

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Batasan Tindakan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah." Dikunjungi 6 November 2025. <https://ptun-makassar.go.id/batasan-tindakan-dalam-hukum-administrasi-pemerintahan-dan-perbuatan-dalam-hukum-perdata-oleh-pemerintah/>.
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. *Laporan Antara RP2KPKP Kota Padang Panjang Tahun 2024*. Padang Panjang: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020*. Padang Panjang: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2021.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup. *Laporan Pendahuluan RP2KPKPK Tahun 2024*. Padang Panjang: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, 2024.

Hidranto, Firman. "Indonesia di Jalan Menuju SDGs 2030: Tantangan dan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan." *Indonesia.go.id*. 27 September 2024. Diakses 12 November 2025. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8618/indonesia-di-jalan-menuju-sdgs-2030-tantangan-dan-komitmen-pembangunan-berkelanjutan?lang=1>.

Ridlo, Mohammad Agung. "Dampak Negatif Keberadaan Permukiman Kumuh dan Liar di Indonesia." *Kompasiana*, 22 Agustus 2025. Diakses 12 November 2025. <https://www.kompasiana.com/mohammadagungridlo7217/68a881f6c925c4120c4baef5/dampak-negatif-keberadaan-permukiman-kumuh-dan-liar-di-indonesia>.

Spiritsumbar.com. "Area Kawasan Kumuh di Padang Panjang Turun dari 44,7 Ha ke 24,4 Ha". Dikunjungi pada tanggal 27 September 2025. Area Kawasan Kumuh di Padang Panjang Turun dari 44,7 Ha ke 24,4 Ha – Spiritsumbar.

## E. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

